PENGARUH PDRB, INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Peryaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

ASYARIO KURNIAWAN
NIM. B1011221200

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Asyario Kurniawan
NIM	:	B1011221200
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh PDRB, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 26 Sepember 2026

Asyario Kurniawan
NIM. B1011221200

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Asyario Kurniawan
NIM	:	B1011221200
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh PDRB, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 26 September 2026

Asyario Kurniawan
NIM. B1011221200

LEMBAR YURIDIS



LEMBAR YURIDIS

Pengaruh PDRB, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Asyario Kurniawan
B1011221200

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 02 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D.	13/08/2026	
		NIP. 196912011994032004		
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. Fariastuti, S.E., M.A.	13/08/2026	
		NIP. 196303171986032002		
3.	Anggota Penguji	Hasanah, S.E., M.E.	13/08/2026	
		NIP. 199412182024062001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 07 SEP 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah-Nya dan tidak lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh PDRB, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat". Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, kesehatan, serta kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam setiap proses, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi selama penyusunan tugas akhir, Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan terbaik bagi penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk rasa syukur penulis atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.
2. Kedua orang tua, Erwin Darsono dan Alm. Titik Kasmiati, terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya.
3. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku rektor Universitas Tanjungpura periode 2023-2027
4. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Ibu Dr. Fariastuti, S.E., M.A. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang membantu penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

9. Ibu Hasanah, S.E., M.E. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang membantu penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.
10. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
11. Teman-teman Kelas D dan teman-teman angkatan 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak yang telah membantu sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis semasa SMP dan SMA, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat, dan menemani penulis dalam berbagai proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pontianak, 26 September 2026

Asyario Kurniawan
NIM. B1011221200

PENGARUH PDRB, INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN BARAT

[1]Asyario Kurniawan

Universitas TamjungPura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, Human Development Index (HDI), and Government Spending on the Open Unemployment Rate in 14 Regencies/Cities of West Kalimantan Province during the 2017–2024 period using panel data regression with the Fixed Effect Model approach and Autoregressive order 1 correction. The simultaneous test results show that all four variables significantly affect the Open Unemployment Rate, explaining 90.64% of the model's variance. Partially, GRDP has a significant negative effect as regional economic output expands labor absorption. Conversely, Investment has a insignificant positive effect due to the dominance of capital-intensive sectors triggering technological unemployment. HDI also exerts a significant positive effect, reflecting a skill mismatch in the form of educated unemployment. Meanwhile, Government Spending has an insignificant positive effect because regional budgets are heavily dominated by operational bureaucracy expenditures. Local governments are advised to maintain real economic stability, reorient investment toward labor-intensive sectors, align educational curricula with local industrial needs, and shift routine bureaucratic spending into productive physical capital expenditure.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Investment, Human Development Index, Government Spending, Open Unemployment Rate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2024 menggunakan regresi data panel pendekatan Fixed Effect Model dengan koreksi Autoregressive orde 1. Hasil uji simultan menunjukkan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan nilai determinasi sebesar 90,64%. Secara parsial, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan karena output ekonomi daerah mampu memperluas penyerapan angkatan kerja. Sebaliknya, Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan akibat dominasi sektor padat modal yang memicu pengangguran teknologi. IPM juga berpengaruh positif dan signifikan yang mencerminkan fenomena skill mismatch berupa penumpukan pengangguran terdidik. Sementara Belanja Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan karena anggaran daerah didominasi pengeluaran operasional birokrasi rutin. Pemerintah daerah disarankan menjaga stabilitas ekonomi riil, mereorientasi investasi ke sektor padat karya, menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan industri lokal, serta mengalihkan belanja rutin birokrasi menjadi belanja modal fisik sektor riil.

[1] b1011221200@student.untan.ac.id

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka.*

PENGARUH PDRB, INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Asyario Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, salah satunya tecermin dari kemampuan pasar kerja lokal dalam menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Selama periode tahun 2017 hingga 2024, perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Namun demikian, fluktuasi angka ketenagakerjaan regional masih memperlihatkan indikasi yang belum stabil, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada pada kisaran 4–5 persen dengan titik lonjakan tertinggi terjadi pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat indikasi ketimpangan spasial yang cukup lebar antar-wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Wilayah pusat perkotaan seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang konsisten mencatatkan angka pengangguran yang jauh lebih tinggi akibat pesatnya arus urbanisasi yang tidak diimbangi ketersediaan sektor formal. Sebaliknya, daerah perdesaan berbasis agraris cenderung mencatatkan TPT yang lebih rendah karena aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor primer tradisional. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kecepatan pertumbuhan ekonomi makro dengan kapasitas riil sektor-sektor produktif di daerah dalam menyerap lonjakan angkatan kerja baru setiap tahunnya.

2. Permasalahan

Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta lonjakan arus modal investasi di Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak utama yang efektif untuk memangkas angka pengangguran di tingkat lokal. Roda perekonomian daerah disinyalir masih didominasi oleh aktivitas industri berskala besar pada sektor primer ekstraktif dan perkebunan yang cenderung bersifat padat modal (*capital intensive*), sehingga menciptakan keterbatasan ruang bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

Tantangan penyerapan ini diperumit oleh adanya gejala skill *mismatch* (ketidaksesuaian keterampilan) di mana perbaikan mutu pendidikan atau kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru memicu penumpukan pengangguran terdidik (*educated unemployment*) akibat tingginya ekspektasi upah lulusan baru yang tidak sejalan dengan

kualifikasi industri lokal. Di sisi lain, perluasan instrumen fiskal melalui belanja pemerintah daerah juga belum memberikan stimulus ekonomi yang optimal karena postur pengeluaran masih didominasi oleh pembiayaan rutin birokrasi dan belanja operasional rutin aparatur negara.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
4. Apakah terdapat pengaruh belanja pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode pengamatan tahun 2017–2024. Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi berkala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat serta dokumen postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara itu, variabel independen meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah. Analisis model estimasi terbaik ditentukan melalui serangkaian pengujian yang meliputi Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan hasil pengujian model, pendekatan terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) yang dilengkapi dengan tindakan koreksi *Autoregressive* orde 1 (AR(1)) untuk menetralisasi gejala autokorelasi

positif dalam model. Seluruh proses pemodelan dan pengolahan data panel ini dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 14.

6. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian simultan (Uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat. Keterkaitan erat antarvariabel ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar 0,9064. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 90,64 persen variasi naik-turunnya angka pengangguran terbuka pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dapat dijelaskan secara kuat dan akurat oleh keempat variabel independen yang diteliti, sedangkan sisa rasionya sebesar 9,36 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pemodelan regresi ini.

Secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Temuan empiris ini sangat sejalan dengan konsep landasan Teori Ekonomi Keynesian, di mana perluasan nilai output perekonomian daerah mampu menstimulus terciptanya penyerapan angkatan kerja baru di pasar kerja lokal melalui mekanisme peningkatan permintaan efektif (*effective demand*). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Barat selama periode pengamatan berhasil mendorong ekspansi kapasitas produksi di sektor-sektor riil, khususnya pada lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang memiliki daya serap tenaga kerja sangat tinggi.

Sebaliknya, variabel Investasi menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Realitas lapangan ini dipicu oleh besarnya konsentrasi arus modal penanaman modal swasta yang masuk ke Kalimantan Barat yang cenderung mendominasi sektor primer skala besar yang bersifat padat modal (*capital intensive*). Alokasi investasi swasta lebih banyak terserap untuk aktivitas perluasan perkebunan kelapa sawit korporasi serta pembangunan teknologi smelter pertambangan yang menggunakan otomatisasi alat berat. Akibatnya, ketergantungan industri terhadap tenaga kerja manusia menjadi berkurang dan membuat daya serap investasi terhadap penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal menjadi sangat minim.

Dinamika yang serupa juga ditunjukkan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil pengujian ini mengonfirmasi adanya deviasi atau penyimpangan dari asumsi Human Capital Theory di pasar kerja lokal dalam bentuk fenomena pengangguran terdidik (*educated unemployment*). Kenaikan capaian pembangunan manusia melalui jalur pendidikan formal ternyata mengubah ekspektasi serta tingkat upah reservasi dari para lulusan baru sehingga mereka cenderung lebih selektif dan memilih menganggur demi mencari pekerjaan formal di perkotaan. Di sisi lain, struktur industri makro Kalimantan Barat saat ini masih didominasi sektor primer tradisional, sehingga kondisi tersebut memicu terjadinya jurang pemisah keterampilan (*skill mismatch*).

Sementara itu, variabel Belanja Pemerintah daerah terbukti memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 14 kabupaten/kota. Belum optimalnya fungsi kebijakan fiskal daerah ini disebabkan oleh postur pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara riil masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan habis tergerus untuk membiayai pos belanja operasional rutin birokrasi serta gaji aparatur sipil negara. Karena alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik Belanja Modal sektor riil porsinya sangat terbatas, instrumen keuangan pemerintah daerah ini mengalami kelumpuhan efek pengganda (*multiplier effect*) sehingga gagal menjadi mesin penggerak dalam memotong rantai pengangguran daerah.

7. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa selama periode tahun 2017 hingga 2024, dinamika ketenagakerjaan di 14 kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Barat secara simultan dikendalikan secara kuat oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah. Namun, secara parsial, pengujian menunjukkan hasil yang beragam di mana hanya variabel PDRB yang terbukti memberikan kontribusi nyata dan bernilai positif dalam memotong rantai pengangguran terbuka melalui perluasan lapangan usaha riil daerah. Sebaliknya, instrumen realisasi investasi swasta justru menunjukkan bias otomatisasi teknologi yang padat modal, peningkatan capaian pembangunan manusia memicu penumpukan angka pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian kualifikasi industri pasar kerja lokal (*skill mismatch*), dan alokasi instrumen belanja pemerintah daerah masih mengalami kelumpuhan efek pengganda akibat tidak efisiennya pengelolaan dana operasional birokrasi rutin yang condong konsumtif.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memfokuskan kebijakan pembangunan makroekonomi pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan angkatan kerja regional. Upaya strategis pertama perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi riil dan merangsang peningkatan kapasitas produksi pada sektor-sektor padat karya tradisional yang memiliki daya serap tinggi, seperti industri pengolahan daerah, sektor perdagangan, dan basis pertanian-perkebunan rakyat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mereorientasi regulasi iklim investasi di daerah dengan tidak hanya berfokus mengejar kuantitas masuknya penanaman modal industri primer raksasa, melainkan mulai memberikan insentif khusus bagi sektor hilirisasi yang memiliki komitmen kuat untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja swasta lokal.

Lebih lanjut, langkah penyelesaian masalah ketenagakerjaan ini juga memerlukan penguatan sinergi horizontal yang intensif antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja guna merombak strategi kurikulum di institusi pendidikan formal serta sekolah vokasi atau SMK agar selaras dengan spesifikasi keahlian riil yang sedang dibutuhkan oleh dunia industri daerah saat ini. Terakhir, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berani dengan memangkas pos belanja operasional rutin birokrasi yang kurang produktif. Alokasi dana tersebut kemudian harus dialihkan secara agresif ke dalam pos Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur

fisik sektor riil masyarakat, sehingga fungsi stimulus ekonomi kebijakan fiskal daerah dapat kembali berjalan efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru yang luas.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vi
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xivv
DAFTAR GAMBAR xv
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
1.2 Rumusan Masalah 6
2. KAJIAN LITERATUR 7
2.1 Landasan Teori 7
2.2 Kajian Empiris 8
2.3 Kerangka Konseptual 9
2.4 Hipotesis Penelitian 10
3. METODE PENELITIAN 11
3.1 Bentuk, Tempat, Dan Waktu Penelitian 11
3.2 Jenis dan Sumber Data 11
3.3 Definisi Operasional 11
3.4 Metode Analisis 12
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.2 Uji Asumsi Klasik 16
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda Data Panel 18
4.4 Uji Hipotesis 19
4.5 Pembahasan 21
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 30
5.1 Simpulan 30
5.2 Rekomendasi 31
DAFTAR RUJUKAN 32
LAMPIRAN 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 3
Tabel 2 PDRB, Investasi, IPM, Belanja Pemerintah, dan TPT KalBar 2017–2024 ... 4
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel 12
Tabel 4 Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel 15
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 16
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas 16
Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas 17
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Stat 17
Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Stat Setelah Koreksi AR(1) 18
Tabel 10 Uji Regresi Data Panel 18
Tabel 11 Uji F-Statistic 20
Tabel 12 Uji R^2 20
Tabel 13 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi KalBar 21
Tabel 14 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi KalBar 22
Tabel 15 Realisasi PMDN KalBar Menurut Sektor 24
Tabel 16 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi KalBar 25
Tabel 17 TPT Provinsi KalBar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 27
Tabel 18 Postur APBD Provinsi KalBar 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 9

PENGARUH PDRB, INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KALIMANTAN BARAT

[1]Asyario Kurniawan

Universitas TamjungPura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, Human Development Index (HDI), and Government Spending on the Open Unemployment Rate in 14 Regencies/Cities of West Kalimantan Province during the 2017–2024 period using panel data regression with the Fixed Effect Model approach and Autoregressive order 1 correction. The simultaneous test results show that all four variables significantly affect the Open Unemployment Rate, explaining 90.64% of the model's variance. Partially, GRDP has a significant negative effect as regional economic output expands labor absorption. Conversely, Investment has a insignificant positive effect due to the dominance of capital-intensive sectors triggering technological unemployment. HDI also exerts a significant positive effect, reflecting a skill mismatch in the form of educated unemployment. Meanwhile, Government Spending has an insignificant positive effect because regional budgets are heavily dominated by operational bureaucracy expenditures. Local governments are advised to maintain real economic stability, reorient investment toward labor-intensive sectors, align educational curricula with local industrial needs, and shift routine bureaucratic spending into productive physical capital expenditure.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Investment, Human Development Index, Government Spending, Open Unemployment Rate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2017–2024 menggunakan regresi data panel pendekatan Fixed Effect Model dengan koreksi Autoregressive orde 1. Hasil uji simultan menunjukkan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan nilai determinasi sebesar 90,64%. Secara parsial, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan karena output ekonomi daerah mampu memperluas penyerapan angkatan kerja. Sebaliknya, Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan akibat dominasi sektor padat modal yang memicu pengangguran teknologi. IPM juga berpengaruh positif dan signifikan yang mencerminkan fenomena skill mismatch berupa penumpukan pengangguran terdidik. Sementara Belanja Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan karena anggaran daerah didominasi pengeluaran operasional birokrasi rutin. Pemerintah daerah disarankan menjaga stabilitas ekonomi riil, mereorientasi investasi ke sektor padat karya, menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan industri lokal, serta mengalihkan belanja rutin birokrasi menjadi belanja modal fisik sektor riil.

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi sasaran utama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tersebut tercermin dari penurunan tingkat pengangguran secara konsisten dari waktu ke waktu. Namun demikian, meskipun perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah. Dea et al., (2025) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan suatu negara dalam menciptakan kesempatan kerja yang merata. Pandangan ini diperkuat oleh Falah et al., (2024) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang gagal menyerap tenaga kerja secara optimal berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan menurunkan efektivitas kebijakan ekonomi jangka panjang.

Perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang berkaitan dengan ketimpangan antarwilayah serta tingkat pengangguran yang belum tertangani secara efektif. Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat belum diiringi oleh kemampuan penciptaan lapangan kerja yang sepadan dengan laju pertambahan angkatan kerja setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional masih bersifat kurang merata dan didominasi oleh sektor-sektor padat modal yang memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap tenaga kerja. Wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan Barat, masih memperlihatkan konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor primer yang berproduktivitas rendah dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan kesempatan kerja (Falah et al., 2024).

Tantangan perluasan kesempatan kerja tersebut diperumit oleh rendahnya efisiensi stimulus fiskal daerah dan adanya fenomena ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) di pasar kerja lokal. Alokasi belanja pemerintah daerah sejauh ini belum efektif menekan angka pengangguran terbuka karena postur APBD masih didominasi oleh pengeluaran operasional birokrasi rutin dan belanja pegawai, sehingga membatasi porsi belanja modal untuk sektor riil yang produktif. Di sisi lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan justru memicu penumpukan pengangguran terdidik (*educated unemployment*) akibat tingginya ekspektasi upah lulusan baru yang tidak sejalan dengan karakteristik industri lokal yang masih tradisional. Kondisi distorsi makro ini sejalan dengan studi oleh Simbolon et al., (2023), yang menegaskan bahwa efektivitas penekanan angka pengangguran makro sangat bergantung pada keselarasan kebijakan upah minimum, pengalihan belanja pemerintah ke sektor padat karya, serta relevansi mutu pembangunan modal manusia terhadap kualifikasi riil yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	**4,36**	**4,18**	**4,35**	**5,81**	**5,82**	**5,11**	**5,05**	**4,86**
Sambas	4,24	3,3	3,48	3,71	3,97	5,08	5,04	4,99
Bengkayang	2,4	2,36	2,66	3,91	4,42	2,84	2,92	2,81
Landak	2,03	2,23	2,69	3,38	3,22	1,78	2,24	2,22
Mempawah	6,72	6,79	5,11	7,55	7,71	7,48	7,33	6,78
Sanggau	3,27	2,42	3	3,52	3,45	3,76	3,86	3,71
Ketapang	3,97	3,17	4,39	7,3	6,94	6,71	6,57	6,36
Sintang	1,93	2,28	3,1	4,5	3,95	2,97	2,92	2,85
Kapuas Hulu	2,21	1,54	2,43	4,02	4,18	2,21	2,19	2,18
Sekadau	0,64	2,75	3,04	3,39	2,92	1,33	2,29	2,24
Melawi	2,11	3,05	2,39	2,7	2,66	1,95	2,46	2,41
Kayong Utara	5	3,86	3,89	3,71	3,78	3,1	3,04	3,02
Kubu Raya	5,91	4,94	5,5	7,14	7,02	6,87	6,76	6,73
Kota Pontianak	9,36	10,21	9,06	12,36	12,38	9,92	8,92	8,29
Kota Singkawang	8,08	7,75	6,31	8,78	9,16	8,63	8,51	7,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat(2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat selama delapan tahun terakhir berada pada kisaran 4–5 persen, dengan tingkat tertinggi pada tahun 2021 mencapai 5,82 persen sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perdagangan dan jasa, sebelum menurun kembali menjadi 4,86 persen pada 2024 (BPS, 2025). Meskipun menurun, kondisi tersebut belum mencerminkan peningkatan stabil dalam penyerapan tenaga kerja formal, sebab sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal berproduktivitas rendah, sementara sektor formal belum berkembang optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Rohaini, (2024) yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat belum mampu menekan pengangguran secara signifikan akibat ketimpangan antarwilayah dan perbedaan struktur ekonomi.

Kesenjangan antarwilayah semakin terlihat dari tingginya TPT di Pontianak dan Singkawang akibat dan terbatasnya peluang kerja formal di wilayah perkotaan, sementara daerah berbasis pertanian seperti Melawi dan Landak memiliki TPT yang relatif lebih rendah karena penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor primer. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi antardaerah, di mana akses terhadap pekerjaan, investasi, serta infrastruktur tidak tersebar secara merata. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan karakteristik ekonomi padat modal, sedangkan daerah perdesaan masih bergantung pada aktivitas pertanian tradisional. Menurut Mulyati, (2025), lemahnya sektor padat karya dan terbatasnya kapasitas sektor formal menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga

manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam perspektif Teori Ekonomi Keynesian, fluktuasi pengangguran ditentukan oleh kekuatan permintaan agregat, sehingga variabel seperti PDRB, investasi, belanja pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam membentuk dinamika pasar tenaga kerja. Peningkatan PDRB dan investasi idealnya mendorong perluasan produksi serta penyerapan tenaga kerja, namun efek tersebut bergantung pada struktur ekonomi daerah yang dapat bersifat padat modal maupun padat karya. Pada saat yang sama, belanja pemerintah menjadi instrumen fiskal strategis untuk memperkuat permintaan efektif melalui pengeluaran produktif, sementara IPM menentukan kapasitas tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan sektor-sektor ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan empiris oleh Andriani et al., (2020) serta Suhadi et al., (2022) yang menegaskan bahwa interaksi variabel makroekonomi dan modal manusia memiliki pengaruh yang signifikan namun bersifat kontekstual terhadap ketenagakerjaan di tingkat daerah. Dengan demikian, kondisi pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2017–2024 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara pertumbuhan ekonomi, arah investasi, kualitas penduduk, dan kebijakan fiskal yang bekerja dalam kerangka teori Ekonomi Keynesian.

Tabel 2 PDRB, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2024

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Investasi (Juta Rupiah)	IPM (Poin)	Belanja Pemerintah (Ribu Rupiah)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2017	177.493,65	52.746.691	66,26	5.259.793.611	4,36
2018	194.138,22	6.591.384	66,98	5.341.404.835	4,18
2019	212.150,33	7.695.834	67,65	5.677.397.310	4,35
2020	213.950,43	9.256.471	68,76	6.582.879.812	5,81
2021	231.321,16	10.773.393	68,99	6.303.146.996	5,82
2022	255.797,28	9.382.923,5	69,71	5.726.991.913	5,11
2023	274.468,58	14.891.955	70,47	6.743.448.956	5,05
2024	300.166,89	15.416.102	71,19	6.272.475.107	4,86

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat(2025)*

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan nilai PDRB tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran karena struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor padat modal yang memiliki daya serap tenaga kerja terbatas (Kuswiyati et al., 2022). Kondisi tersebut terlihat di Provinsi Kalimantan Barat, di mana nilai PDRB mengalami peningkatan signifikan dari Rp.177,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.300,1 triliun pada tahun 2024, sementara tingkat pengangguran tetap berada pada kisaran 4-5% (BPS, 2025). Situasi ini menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan kemampuan sektor produktif dalam menyerap tenaga kerja, sebagaimana disampaikan oleh Dea et al., (2025) dalam kajian mereka di Provinsi Bali.

Investasi memiliki peranan strategis dalam mendorong proses penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan realisasi investasi idealnya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran melalui bertambahnya kapasitas produksi serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Temuan Ramadhani et al., (2025) mengungkapkan bahwa pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sangat ditentukan oleh karakteristik dan arah investasi yang dilakukan, di mana investasi umumnya bersifat padat modal dan berfokus pada kegiatan ekspor. Kondisi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa nilai investasi meningkat signifikan dari Rp.6,5 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp.15,4 triliun pada 2024, namun pertumbuhan tersebut lebih terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan perkebunan yang memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran strategis dalam menekan pengangguran karena mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang menentukan daya saing tenaga kerja (Erwan et al, 2020). Menurut Awary et al., (2025) peningkatan IPM memungkinkan masyarakat beradaptasi lebih baik terhadap tuntutan pasar kerja modern, namun kondisi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat dari 66,26% pada 2017 menjadi 71,19% pada 2024, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional 73,7% sehingga mencerminkan rendahnya mutu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja (Julistia et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan IPM perlu disertai kebijakan pembangunan manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja agar efektif dalam menurunkan pengangguran di tingkat daerah.

Belanja pemerintah yang bersumber dari APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen fiskal utama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat peningkatan signifikan dalam total pengeluaran, dari Rp.5,2 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.6,2 triliun pada tahun 2023, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur dan pendidikan (BPS, 2024). Temuan penelitian Maulana et al., (2025) menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program serta sinergi antar sektor produktif. Alokasi anggaran yang terlalu besar pada belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal cenderung menghasilkan dampak ekonomi yang terbatas terhadap peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Tingginya tingkat pengangguran di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat mengindikasikan dominasi faktor ketidaksesuaian dalam menentukan dinamika pasar tenaga kerja. Studi yang dilakukan oleh Suhadi et al., (2022) menunjukkan bahwa variabel PDRB, upah minimum, serta tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian Permadi et al., (2021) di Provinsi Jawa Timur turut mengonfirmasi bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan upah minimum secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi tingkat pengangguran. Variasi hasil tersebut mencerminkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi dan sosial cenderung

bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik struktur industri di masing-masing daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Permasalahan pengangguran di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, masih bersifat mendasar meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Peningkatan PDRB dan realisasi investasi belum mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, menandakan pertumbuhan yang tidak inklusif dan dominasi sektor padat modal sebagaimana diungkapkan Dea et al., (2025). Ketidakseimbangan ini mencerminkan rendahnya kemampuan sektor produktif dalam menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, peningkatan IPM belum efektif mengurangi pengangguran karena masih terdapat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri modern (Ali et al., 2024). Belanja pemerintah pun belum optimal sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja akibat dominasi pengeluaran rutin dibanding belanja modal produktif (Maulana et al., 2025) .

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
2. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
3. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?
4. Apakah terdapat pengaruh belanja pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017–2024?

1.2.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.